

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi saat ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam memutuskan keputusan dan menunjang pelaksanaan kebijakan pekerjaan pada organisasi sehingga dapat berjalan secara cepat, akurat dan efisien (Wardiningsih, 2009). Implementasi pemanfaatan teknologi ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah sebagai pelaksana pemberi pelayanan kepada masyarakat publik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan perlu dilaksanakan sebaik mungkin seiring meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang tepat dan berdayaguna (Apriyansyah et al., 2018). Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dan dikelola secara seksama, terintegrasi, serta berkelanjutan. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tersebut.

Program Satu Data Indonesia ini terbentuk atas persoalan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan data dalam setiap Keputusan pengambilan kebijakan yang harus terbuka, akurat dan *interoperable*. Satu Data ini memiliki empat prinsip dasar yang terbagi atas satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas data dan referensi data (Banyuasin, n.d.). Seluruh masyarakat

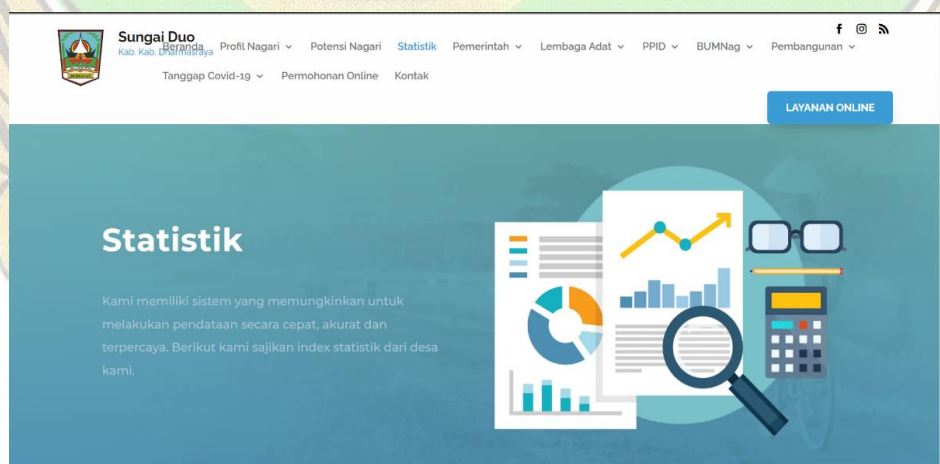
tanpa syarat dapat mengutip sumber dan mengakses data yang tersedia. Data yang ditampilkan tidak dapat diinformasikan kepada publik ketika berisikan informasi yang menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi seseorang, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, ataupun terkait segala informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan Undang-Undang.

Pemerintah kemudian mengajak keseluruhan instansi pemerintahan pusat ataupun di daerah untuk bergabung dalam pelaksanaan satu kebijakan digitalisasi data pemerintahan sebagai Upaya menghasilkan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut, Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta situs resmi bagi Pemerintah Daerah (media elektronik dan non elektronik). Merespon hal tersebut pemerintah Kabupaten

Dharmasraya mengeluarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/314/KPTS-BUP/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya, membentuk inovasi program Nagari Statistik yang dimotori oleh Dinas Komunikas Informatika (Diskominfo) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta didukung seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Dharmasraya.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya yang menuju kepada sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel untuk itu perlu didukung dengan sistem informasi statistik yang memadai, cepat dan juga tepat. Diskominfo Kabupaten Dharmasraya kemudian sejak tahun 2019 yang lalu inisiatif menjalankan inovasi Nagari Statistik dengan dukungan seluruh instansi daerah terkait, yang kemudian dikembangkan dengan baik untuk dapat dengan layak diakses oleh masyarakat publik khususnya masyarakat Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya. Berikut gambaran tampilan Nagari Statistik pada halaman resmi website Nagari Sungai Duo.

Gambar 1.1 Website Pemerintah Nagari Sungai duo mengenai Data Statistik.



Sumber : Website Nagari Sungai Duo (Sungaiduodesa.id)

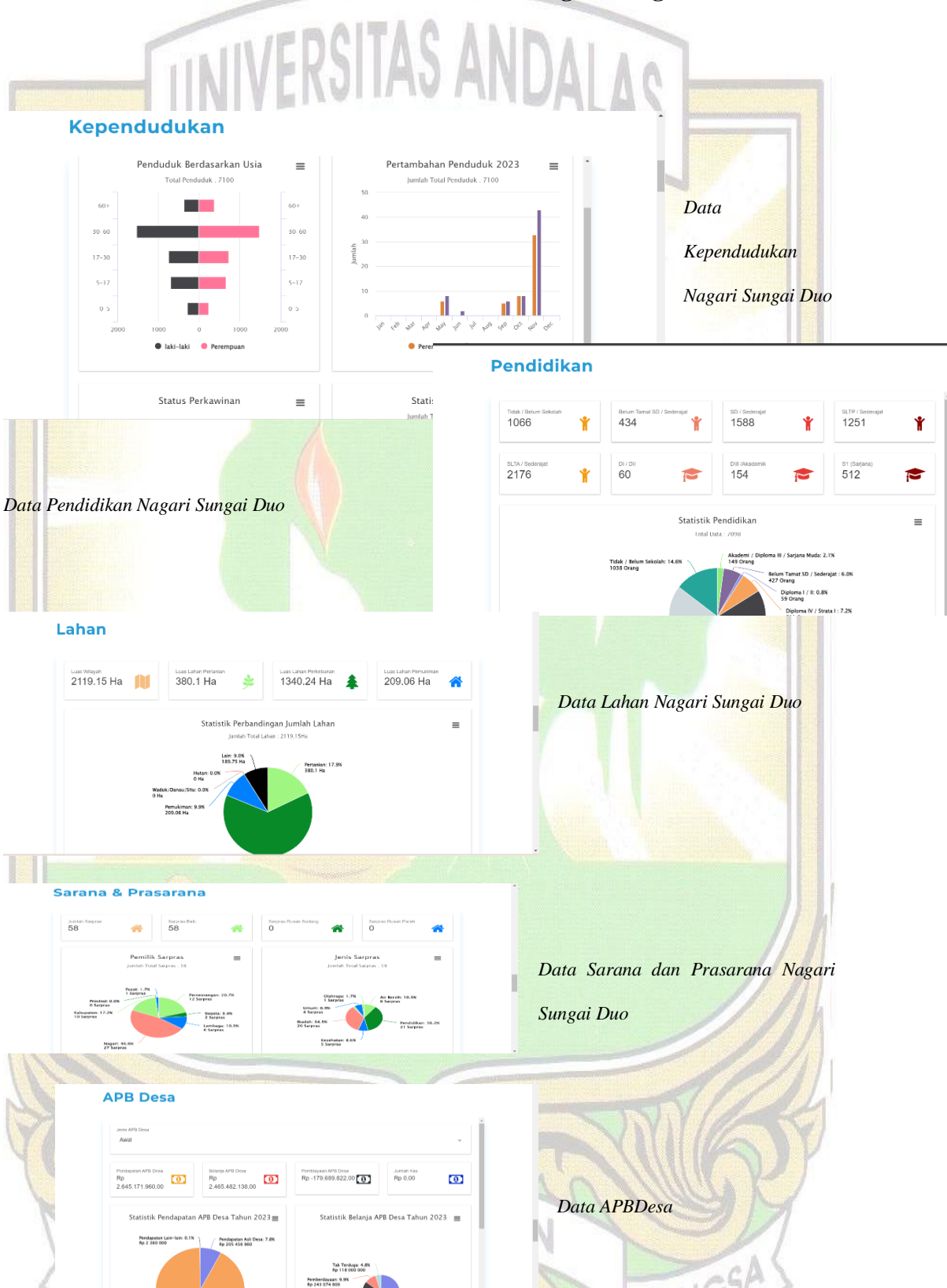
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Ibuk Marlisna, dalam wawancaranya dengan peneliti menyebutkan inovasi ini muncul dilatarbelakangi persoalan pada pemerintahan kabupaten yang menemui ketidakvalidan dan ketidaksesuaian data antar instansi sehingga menyulitkan pemerintahan dalam penetapan keputusan kebijakan. Seperti perbedaan data yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari dari Dinas Sosial dengan Badan Pusat Statistik terkait data jumlah Masyarakat miskin. Angka yang dimiliki oleh Dinas Sosial berbeda dengan angka data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik sehingga menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan keresahan tersebut terciptalah inovasi Nagari Statistik. Hal ini dijelaskan pada wawancara berikut ini.

”Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2016 telah memiliki Bidang Statistik dalam Struktur Organisasinya. Diskominfo Kabupaten Dharmasraya menjadi satu-satunya yang memiliki Bidang Statistik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya permasalahan tentang tidak validnya data-data dasar kependudukan seperti data kemiskinan yang jumlahnya sering berbeda antara data yang dipegang oleh nagari, data yang dimiliki oleh dinas sosial, dan data yang dimiliki oleh data dari Badan Pusat Statistik” wawancara dengan Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Ibuk Marlisna, pada hari Kamis 6 April 2023 Pukul 11.19 WIB

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa data yang dimiliki antara satu instansi dengan instansi lainnya beragam, tidak valid sehingga menimbulkan ambiguitas. Maka diharapkan dengan pelaksanaan inovasi program ini pemerintah daerah akan memiliki satu base data yang sama untuk dapat di akses pada satu instansi dengan instansi lainnya, sehingga tidak akan ada lagi data ganda ataupun ambiguitas data. Contoh hasil pengolahan data statistik tersebut kemudian dapat dilihat pada website Statistik Nagari Sungai Duo, sebagai berikut.

Gambar 1.2 Hasil Data Statistik Nagari Sungai Duo



Sumber : Sungaiduodesa.go.id

Inovasi program Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo ini telah berjalan dengan baik dan bahkan berhasil menjadi program andalan dalam memadukan keseluruhan data instansi yang dipergunakan dalam memberikan akses kepada masyarakat publik, dan telah berhasil mendapatkan penghargaan menjadi pilot project untuk pencanangan Nagari Statistik yang diakui secara nasional, karena memiliki perangkat keterbukaan informasi public. Inovasi ini kemudian juga tercatat sebagai cikal bakal lahirnya Nagari Statistik pertama di Indonesia.

Gambar 1.3 Nagari Sungai Duo Mendapatkan Penghargaan



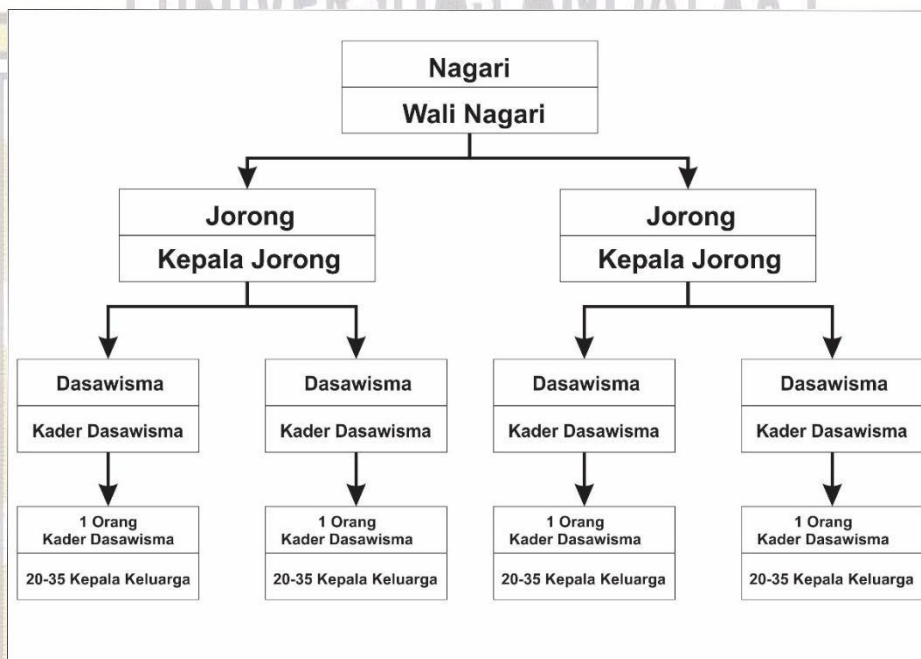
Sumber : Sungaiduodesa.go.id

Menurut Syahida dan Suryani, Keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari peran dan hasil kinerja pegawai yang ada di dalamnya (Syahida & Suyani, 2018). Keberhasilan program Nagari Statistik ini adalah keberhasilan kinerja dari keseluruhan anggota instansi pemerintahan. Program Nagari Statistik Nagari Sungai Duo ini dilaksanakan dengan di monitori langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta didukung seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) se-Kabupaten Dharmasraya. Pada pelaksanaan program ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Diskomifo Kabupaten Dharmasraya, beserta didukung oleh 27 kepala instansi terkait dan 5 kasi dari beberapa instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, pada saat pelaksanaan survey pendataan untuk Nagari Statistik tersebut akan koordinasikan oleh 15 kepala jorong beserta sejumlah kader yang nantinya akan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan pendataan 20 sampai 35 kepala keluarga bagi setiap kadernya, dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat secara *door to door*. Sehingga pada pelaksanaanya program ini ujung tombak pelaksanaan akan dilaksanakan oleh pada kader yang langsung mendatangi masyarakat, untuk kemudian data yang di dapatkan akan dilaksanakan dengan pengelompokan dan analisa oleh masing-masing instansi sebelum kemudian akan diserahkan kepada kominfo dan badan statistik untuk dilaksanakan pengukuran dan pengolahan menjadi statistik yang dibutuhkan pada website Nagasi Statistik Sungai Duo tersebut. Berikut struktur kader sebagai pelaksanaan ujung tombak kegiatan survey pendataan tersebut.

Gambar 1.4 Struktur Koordinasi Nagari Sungai Duo dalam melakukan survey dan pendataan penduduk sebagai Nagari Statistik



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2023

Keberhasilan pelaksanaan program Nagari Statistik ini dinilai dari kualitas kinerja yang dihasilkan, dengan bukti penghargaan yang telah diterima oleh Bupati Dharmasraya berarti program Nagari Statistik ini telah menunjukkan kualitas kinerja yang baik. Kinerja yang dimaksud menurut Prawirosentono merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. (Lijan Poltak Sinambela, 2012). Hal ini juga dibenarkan oleh Setyobakti yang mengatakan bahwa Kualitas kinerja merupakan ukuran dalam menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja sangat tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat didalamnya (Setyobakti, 2018).

Kemudian, menurut Eka dan Ismiyanti, salah satu sumber daya yang mempengaruhi berasal dari faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kepemimpinan. Peranan kepala daerah sebagai pemimpin organisasi pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas perangkat daerah (Eka & Ismiyati, 2015). Harianta dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa, dalam meningkatkan kinerja aparatur sangat dibutuhkan kepemimpinan yang mengarahkan pada peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Harianta, 2012). Pada pelaksanaan program Nagari Statistik ini melibatkan banyak koordinasi antar instansi dan mengharuskan pengerahan anggota yang baik agar tujuan pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik. Selain itu faktor yang mendorong pelaksanaan kinerja individu berasal dari motivasi anggota.

Menurut Sudin dan Sudarman dalam jurnalnya mengemukakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, jadi baik dan buruknya motivasi pegawai menjadi salah satu alasan tinggi rendahnya kinerja yang dihasilkan (Suddin & Sudarman, 2010). Perangkat Nagari Sungai Duo dapat meningkatkan kinerjanya ketika dari dalam diri tumbuh dorongan untuk bekerja keras dan antusias dalam mencapai tujuan program yang dikehendaki. Secara tidak langsung tingkat motivasi perangkat nagari juga dipengaruhi oleh kepemimpinan wali nagari. Oleh sebab itu pimpinan penting mengetahui apa yang menjadi motivasi para pegawai atau bawahannya untuk dapat berkinerja baik (Suddin & Sudarman, 2010).

Melihat kepada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan penelitian seperti pelaksanaan penelitian oleh Sandra Wilherma dan

Pandji Anoraga dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Subah Kabupaten Batang, yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dengan variabel dominan yang paling berpengaruh berasal dari variabel motivasi, hal ini dikarenakan rendahnya keinginan perangkat desa untuk berkinerja baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya (Wijaya & Anoraga, 2021). Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Yulianti dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan jumlah sampel sebanyak 87 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh peningkatan kinerja pegawai yang ada berdasarkan kepada kepemimpinan dan motivasi pegawai, semakin baik kepemimpinan dan motivasi kerja maka akan sebaik pula kinerja pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten (Yulianti, 2015).

Terakhir, pelaksanaan penelitian oleh Tuty Rosyaty dan Cecep Andi dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Kepala Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi (Studi Evaluasi Kebijakan Pemeriksaan Inspektorat Terhadap Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Penelitian kemudian menghasilkan bahwa adanya hubungan yang kuat terkait kepemimpinan dengan motivasi kerja, dengan nilai korelasi kepemimpinan sebesar 73,90% dan pengaruh motivasi sebesar 77,60% terhadap kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada

Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Pada penelitian Sandra, Rachmi dan Tuty melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan. Pada penelitian Sandra dijelaskan bahwa adanya hubungan korelasi kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja dengan motivasi adalah variable yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja perangkat desa, bedanya dengan penelitian peneliti adalah pelaksanaan penelitian Sandra dilakukan dengan memperhatikan bagaimana sikap, kebutuhan dan persepsi anggota dengan lingkungan kerjanya, hal ini berbeda dengan pelaksanaan penelitian yang berfokus kepada bagaimana perilaku anggota terhadap hasil kinerja yang dilakukannya karena berfokus kepada pelaksanaan program inovasi pemerintahan.

Kemudian pada pelaksanaan penelitian oleh Yulianti perbedaan pelaksanaan penelitian dengan yang peneliti lakukan terletak pada indikator dimensi variabel penelitian, Yulianti berdasarkan kepada Kepemimpinan atas *telling, selling, participating, delegating* dan untuk motivasi kerja berdasarkan kepada dua indikator berupa dorongan dari dalam diri dan dari luar diri. Perbedaan indikator ini kemudian akan menjadikan perbedaan pelaksanaan penelitian. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Tuty memiliki perbedaan sudut pandang dengan pelaksanaan penelitian peneliti, peneliti berdasarkan kepada pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pemerintahan dalam sudut pandang program pelaksanaan sedangkan tuty berfokus kepada pelaku pelaksanaan kinerja.

Dari penjelasan beberapa penelitian tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa Penelitian "Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo sebagai Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya" merupakan sebuah penelitian yang sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, penelitian ini akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang berbeda dan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengimplementasikan dan mengembangkan Inovasi Program Desa atau setingkat dengan desa terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi dan Data dalam konteks pelayanan publik Desa. Oleh karena itu berdasarkan uraian masalah, fenomena empiris, dan fenomena teoritis pada tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang **"Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo Sebagai Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan penelitian tersebut maka keberhasilan Nagari Sungai Duo untuk menjalankan pelaksanaan *pilot project* Satu Data Indonesia sebagai Nagari Statistik akan ditentukan oleh kinerja perangkat nagarinya sendiri. Maka berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Wali Nagari Sungai Duo terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo dalam Program Nagari Statistik?
2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja pegawai Nagari Sungai Duo terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo dalam Program Nagari Statistik?

3. Bagaimana pengaruh dari Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo dalam Program Nagari Statistik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Sungai Duo sebagai Nagari Statistik Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang Manajemen Publik pada pemerintahan daerah. Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Manajemen Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan acuan bagi Bupati atau Walikota yang ada di Provinsi Sumatera Barat ataupun Indonesia terkait Inovasi Program Nagari Statistik.